

REVIU

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



REVIU

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 disusun sebagai Rencana Kinerja tahun keempat dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.



Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 yang telah direviu ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2024

↓ **DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN** ↗

Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., MM., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 DASAR HUKUM | 1 |
| 1.2 LATAR BELAKANG | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| 1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | 3 |
| BAB II RENCANA STRATEGIS 2020-2024..... | 11 |
| 2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN | 11 |
| 2.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 12 |
| 2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024 | 13 |
| 2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024 | 15 |
| 2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024 | 15 |
| 2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024 | 16 |
| 2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024 | 17 |
| BAB III EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2015-2019 | 19 |
| 3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN | 19 |
| 3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT | 20 |
| 3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 33 |
| BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2024 | 36 |
| 4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 | 36 |
| 4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 | 37 |
| 4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024 | 38 |
| 4.3.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | 39 |
| 4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | 44 |
| 4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | 46 |
| 4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian | 49 |

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 4.3.5 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian | 51 |
| 4.3.6 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | 52 |
| 4.3.7 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian | 54 |
| 4.3.8 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian | 55 |
| 4.3.9 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian | 55 |
| 4.4 | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 | 56 |
| BAB V PENUTUP | | 60 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024..... | 16 |
| Tabel 2.2 | Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024..... | 17 |
| Tabel 3.1 | Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019 | 20 |
| Tabel 3.2 | Capaian Output Bidang Sarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019..... | 21 |
| Tabel 3.3 | Capaian Output Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Tahun 2015-2019..... | 23 |
| Tabel 3.4 | Capaian Output Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019..... | 25 |
| Tabel 3.5 | Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2015-2019 | 28 |
| Tabel 3.6 | Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019..... | 30 |
| Tabel 3.7 | Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 | 34 |
| Tabel 4.1 | Target Rincian Output (RO) Pelayanan Transportasi Perkeretaapian 2024 | 39 |
| Tabel 4.2 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Keselamatan, Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 | 44 |
| Tabel 4.3 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 | 47 |
| Tabel 4.4 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 | 50 |
| Tabel 4.5 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024..... | 52 |
| Tabel 4.6 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024..... | 52 |
| Tabel 4.7 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 | 54 |
| Tabel 4.8 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 | 55 |
| Tabel 4.9 | Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024..... | 55 |
| Tabel 4.10 | Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2024 | 56 |
| Tabel 4.11 | Reviu Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024..... | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian | 3 |
| Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019..... | 19 |



B A B 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 terdiri dari peraturan perundangan berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020–2024;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 10 TAHUN 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 yang merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian; dan
- d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur

Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api,

- perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kerta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
 - c. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kerta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkertaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan superivisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis terhadap kualitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk balai-balai yang merupakan sebagai pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.63 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.64 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.65 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.119 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1) Balai Teknik Perkeretaapian

Balai Teknik Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana, dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Teknik Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;

- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
- f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
- g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;
- h. Pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2) Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
- b. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak dan tanpa pengerak;
- c. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
- d. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- f. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguji Prasarana, Penguji Sarana, Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana, dan Auditor Perkeretaapian;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

3) Balai Perawatan Perkeretaapian

Balai Perawatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik Negara;
- c. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian milik Negara;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik, dan hubungan masyarakat;
- e. Balai Perawatan Perkeretaapian dapat juga melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.

4) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan;
- c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

5) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Pulau Sulawesi, Penyusunan grafik perjalanan kereta api, dan kemitraan;
- d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan, pengoperasian, dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan dan pengusulan tarif angkutan penumpang dan barang serta pelaksanaan pemanfaatan aset;
- f. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api;
- g. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- h. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



B A B 2

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Dasar Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan visi dan misi Presiden yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur. Visi Presiden lima tahun ke depan Indonesia Periode Tahun 2020 - 2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Presiden dalam Pembangunan Nasional Indonesia Periode Tahun 2020 -2024 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuh agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung 2 dari 7 agenda pembangunan dimaksud melalui strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda pembangunan. Dukungan pada 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan I

(Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan 1 - RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam dan Kawasan Industri luar Jawa. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: 1) Pembangunan kereta api barang di Kalimantan; 2) Peningkatan jalur kereta api Sumatera Selatan.
- b. Meningkatkan daya saing destinasi dan industrialisasi pariwisata. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: Pembangunan jalur ganda, peningkatan dan reaktivasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2) Pembangunan jalur kereta api Mengwitani – Singaraja; 3) Pembangunan jalur kereta api Pematang Siantar – Danau Toba.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud adalah: 1) Pembangunan jalur ganda kereta api Rangkas Bitung – Merak; 2) Reaktivasi jalur kereta api Banten.

Agenda Pembangunan V

(Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan V - RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan strategi meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- b. Memperkuat Infrastruktur Ekonomi dengan strategi meningkatkan konektivitas perkeretaapian. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya:
 - i. Pembangunan Jalur KA (termasuk reaktivasi dan jalur ganda);
 - ii. Peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jalur KA;
 - iii. Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara;
 - iv. Penyediaan PSO dan Subsidi.

- c. Memperkuat Infrastruktur Perkotaan dengan strategi mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 Kota metropolitan

A. MENINGKATNYA NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL DAN INDUSTRIALISASI

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi, 9 KI (kumulatif) dan percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas, 10 destinasi (kumulatif).

B. MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur layanan dasar yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi melalui menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi dari 0,23 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.

C. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS WILAYAH

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah terbangunnya jaringan KA (kumulatif) sepanjang 7.451 km'sp dan kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 sebesar 94%.

D. MENINGKATNYA LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DI 6 (ENAM) KOTA METROPOLITAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui peningkatan layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan yang berkaitan langsung dengan bidang perkeretaapian adalah jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan sejumlah 6 (enam) kota dan jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang sejumlah 6 (enam) kota.

2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan

di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 juga mencantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan /transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;
4. Transportasi Perkotaan.

Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan, maka sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional; Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Untuk mewujudkan tujuan:

- a) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca;
- b) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum dan meningkatnya tata kelola organisasi;
- c) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
2. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.
3. Sasaran program yang ingin dicapai dalam peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal.

2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua (2) program dan sembilan (9) kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Strategi pembangunan di bidang perkeretaapian tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024

| NO | SASARAN | STRATEGI |
|----|---|--|
| 1. | Peningkatan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian dengan Aksesibilitas yang Tinggi | <ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan;b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi;c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara. |
| 2. | Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal | <ul style="list-style-type: none">a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting;b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian;c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis. |
| 3. | Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal | <ul style="list-style-type: none">a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian;b) Sertifikasi sarana perkeretaapian;c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian;d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian;e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO);f) Pemenuhan kebutuhan IMO;g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana;h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan;i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api. |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2020-2024

Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2020-2024. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran program maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan arahan dalam RPJMN 2020- 2024. Ada 5 (lima) indikator kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung tiga sasaran pembangunan nasional dalam Agenda Pembangunan 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan dasar), yaitu:

1. Sasaran meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan.
2. Sasaran meningkatnya konektivitas wilayah dengan indikator Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) dan Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2.
3. Sasaran meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan dengan indikator Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dan Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020- 2024 serta reuiu terhadap target tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

| NO | TUJUAN/ SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | BASELINE TAHUN 2019 | | | | | TARGET RENSTRA 2024 |
|-----------|--|--|---------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peningkatan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian dengan Aksesibilitas Tinggi | | | | | | | |
| | Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur | IKP 1 Rasio konektivitas antar wilayah | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | BASELINE TAHUN 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TARGET RENSTRA 2024 |
|-----------|--|---|---------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2. | Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Handal | | | | | | | |
| | Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan SDM, Sarana dan Prasarana yang handal | IKP 6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>) | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 3. | Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal | | | | | | | |
| | Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan | IKP 2 Persentase <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api | 81,31 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| | | IKP 3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api | - | 10 | 21 | 47 | 73 | 100 |
| | | IKP 4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api | - | 11 | 27 | 46 | 68 | 100 |
| | | IKP 5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II | 81,50 | 83 | 85 | 87 | 90 | 94 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

*Penyesuaian Target 2024 berdasarkan pembahasan PK dan Renaksi Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

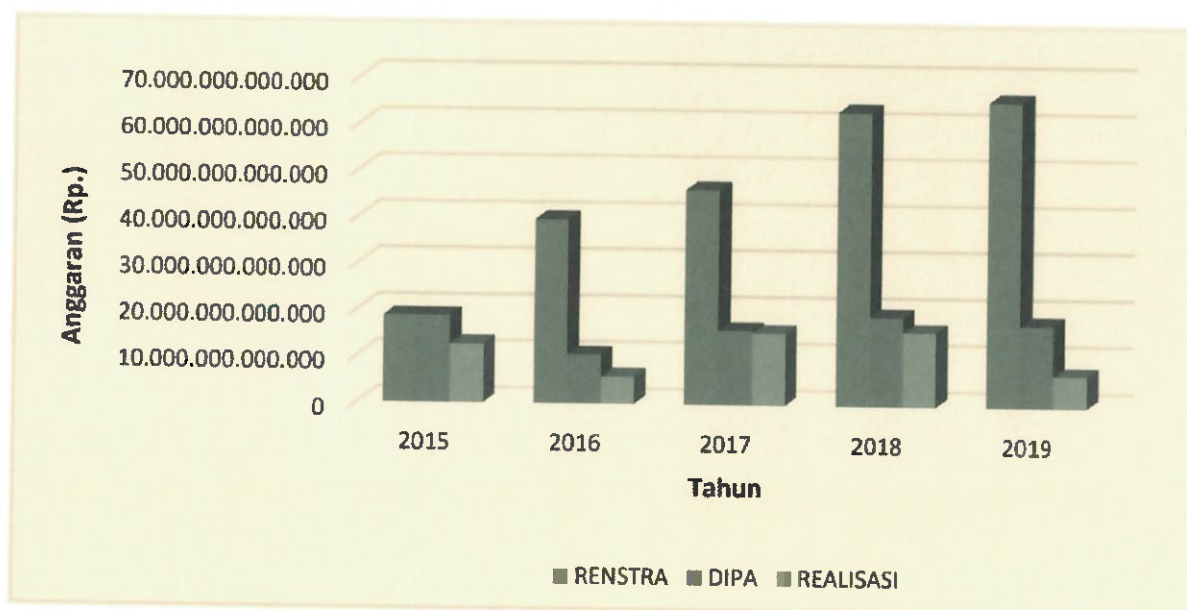


BAB 3

EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2015-2019

3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang perkeretaapian, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian untuk Tahun 2015-2019 sekitar Rp 233 triliun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN, maka sampai dengan tahun 2019, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang disediakan total hanya mencapai Rp. 81 triliun atau 35% dari total kebutuhan tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra. Gap pembiayaan tahun 2015-2019 sampai mencapai Rp. 151 triliun.



Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

Secara rinci per kegiatan/ unit kerja Eselon I dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

| Tahun | RPJMN | Reviu Renstra | DIPA | Realisasi |
|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2015 | 18.697.955.926.000 | 12.583.388.000 | 18.697.955.926.000 | 12.563.760.933.460 |
| 2016 | 39.558.846.384.000 | 11.690.413.000 | 10.407.315.735.000 | 5.801.339.893.298 |
| 2017 | 46.200.813.641.000 | 23.526.744.000 | 16.022.981.642.000 | 15.487.396.107.877 |
| 2018 | 63.253.294.900.000 | 32.810.329.000 | 19.188.457.243.000 | 15.949.445.231.083 |
| 2019 | 65.641.932.209.000 | 46.262.372.000 | 17.648.465.659.000 | 6.836.010.427.155 |
| Total | 233.352.843.060.000 | 126.873.247.000 | 81.965.176.205.000 | 56.637.952.592.873 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

Sehubungan dengan pembiayaan/pendanaan pada APBN Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2015-2017 hanya mencapai 43% dari kebutuhan berdasarkan Renstra 2015-2019, maka pencapaian output juga sebagian besar tidak dapat tercapai sesuai target. Berdasarkan target output dalam Renstra tahun 2015-2019, dapat diperoleh pencapaian sampai dengan tahun 2019 masing-masing kegiatan/output sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

Tabel 3.2 Capaian Output Bidang Sarana Perkeretaapian Tahun 2015 -2019

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|------------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian | Dokumen/ Laporan | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 23,44 | 6 | 2 | 13 | 12,67 |
| Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian | Sertifikat | | | 24 | 3 | 11.050 | 7.728,20 | 78 | 58 | 14.000 | 16.303 |
| Sarana Perkeretaapian | Unit | 37 | 49 | 11 | 2 | 6 | 6 | 31 | 8 | 2 | 2 |
| Fasilitas/ Peralatan Sarana Perkeretaapian | Unit | | | 4 | 2 | 114 | 1 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Perawatan Sarana Perkeretaapian | Tahun | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Pengadaan Sarana Perkeretaapian | Unit | 6 | 2 | 3 | 1 | | | | | | |
| Pengadaan Fasilitas Pengujian Sarana Perkeretaapian | Unit | | | 4 | 6 | | | | | | |
| Sertifikat Uji Sarana Perkeretaapian | Sertifikat | | | 4.000 | 3.300 | | | | | | |
| Studi/ Kebijakan/ Kajian/ Kebijakan/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur/ Masterplan/ STD Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Perkeretaapian | Dokumen | 11 | 8 | 3 | 3 | | | | | | |
| Monitoring/ Pengawasan dan Evaluasi | Laporan | | | 24 | 48,29 | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS (1) | SATUAN (2) | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|--|---------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT | Tahun | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| Layanan Perkantoran | Bulan Layanan | | | 12 | 12 | | | | | | |
| Kendaraan Bermotor | Unit | | | 2 | 2 | | | | | | |
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Unit | | | 8 | 8 | | | | | | |
| Layanan Internal (Overhead) | Layanan | 1 | 1 | | | 7 | 7 | 1 | 1 | | |
| Layanan Perkantoran | Tahun | | | | | 24 | 21,64 | 1 | 1 | | |
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Layanan | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Layanan Dukungan Manajemen Satker | Layanan | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Layanan Perkantoran | Layanan | | | | | | | | | 1 | 1 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

B. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tabel 3.3 Capaian Output Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2015-2019

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|--|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Bimbingan dan Koordinasi Teknis | Laporan | 4 | 4 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Laporan | | | 28 | 56 | 2 | 0 | 3 | 0 | | |
| Subsidi Angkutan Kereta Api | Kegiatan | 3 | 3 | 7 | 36 | | | | | | |
| Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | Laporan | | | 5 | 4 | | | | | | |
| Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Dokumen | 31 | 32 | 28 | 26 | | | | | | |
| Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja | Laporan | | | 2 | 2 | | | | | | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT | Tahun | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Unit | | | 2 | 2 | | | | | | |
| Layanan Dukungan Manajemen Satker | Layanan | | | | | | | | | 1 | 1 |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian | Laporan | | | | | 41,00 | 38,42 | 12 | 12 | 18,00 | 12,67 |
| Trase Jaringan Kereta Api | Laporan | | | | | 11 | 7 | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 |
| Angkutan Kereta Api | Kegiatan | | | | | 6 | 6 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| Grafik Perjalanan Kereta Api | Laporan | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Layanan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian | Layanan | | | | | 9 | 9 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| Layanan Internal (Overhead) | Layanan | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional) | Kegiatan | | | | | | | 8 | 8 | 7,00 | 7,00 |
| Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Serta Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian | Laporan | | | | | | | 10 | 8 | 8,00 | 8,00 |
| Trase Jaringan Kereta Api (Prioritas Nasional) | Laporan | | | | | | | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

C. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Tabel 3.4 Capaian Output Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|--|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Jalan Rel | Km'sp | 357,79 | 512,9 | 1.900,5 | 232,09 | | | | | | |
| Jembatan/ Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover | Km'sp | 110,0 | 192,0 | 42,0 | 125,35 | | | | | | |
| Stasiun/ Bangunan Operasional | Unit | 21 | 7 | 6 | 6 | | | | | | |
| Pemagaran Fasilitas Pendukung | Paket | 5 | 36 | 457 | 457 | | | | | | |
| Persinyalan | Paket | 22 | 11 | 8 | 48,16 | | | | | | |
| Transmisi Tenaga Listrik (LAA) | Km'sp | 51,25 | 88 | 10 | 0 | | | | | | |
| Catu Daya (Sub Station) | Unit | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | |
| Pengamanan Perlintasan Sebidang | Paket | 34 | 0 | 3 | 2 | | | | | | |
| Bangunan Khusus | Unit | 1 | 0 | 5 | 1 | | | | | | |
| Pengadaan Tanah | Paket | 34 | 8 | 817.179 | 699.877 | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan/ Fasilitas Prasarana Perkeretaapian | Paket | 37 | 4 | 24 | 49,43 | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|--|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Bidang Prasarana Kereta Api | Dokumen | 84 | 81 | 86 | 175,24 | | | | | | |
| Pengujian Prasarana Kereta Api | Unit | | | 2 | 23,64 | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Laporan | | | 22,00 | 75,64 | | | | | | |
| Bimbingan dan Koordinasi Teknis | Laporan | 4 | 8 | 6,00 | 19,42 | | | | | | |
| Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja | Laporan | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait Operasional Satker/ UPT | Laporan | | | 9,00 | 46,93 | | | | | | |
| Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) | Tahun | | | 1,00 | 0,51 | | | | | | |
| Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 12,00 | 32,90 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1,00 | 0,72 |
| Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Laporan | | | 3,00 | 52,77 | | | | | | |
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Laporan | | | 6,00 | 58,38 | | | | | | |
| Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian | Laporan | | | | | 32 | 23 | 15 | 19 | 16 | 11,76 |
| Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian | Sertifikat | | | | | 400 | 245 | 12 | 12 | 400 | 377,00 |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS (1) | SATUAN (2) | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|---------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| Prasarana Perkeretaapian | Km'sp | | | | | 759,70 | 722,68 | 23,90 | 15,79 | 12,50 | 12,43 |
| Fasilitas Pendukung Prasarana Perkeretaapian | Paket | | | | | 26 | 13,82 | 3 | 2 | 2 | 2,00 |
| Operasi Prasarana Perkeretaapian Milik Negara | Paket | | | | | 1.500 | 1.383,60 | 1 | 1 | 1 | 0,71 |
| Layanan Internal (Overhead) | Layanan | | | | | 11 | 8,45 | 2 | 2 | | |
| Prasarana Perkeretaapian (Prioritas Nasional) | Km'sp | | | | | | | 659,40 | 436,85 | 43.413,65 | 28.107,61 |
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Layanan | | | | | | | | | 1,00 | 0,75 |
| Layanan Dukungan Manajemen Satker | Layanan | | | | | | | | | 1,00 | 0,68 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

D. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Tabel 3.5 Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2015-2019

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Sosialisasi/ Rakor/ Seminar/ Workshop Keselamatan Perkeretaapian | Kegiatan | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan Keselamatan Perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian | Paket | 18 | 18 | 2 | 2 | | | | | | |
| Pemeriksaan di Bidang Keselamatan Perkeretaapian | Kegiatan | | | 11 | 9 | | | | | | |
| Monitoring/ Pengawasan dan Evaluasi | Laporan | | | 20 | 33 | | | | | | |
| Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian | Kegiatan | 6 | 6 | 10 | 9 | | | | | | |
| Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM serta Pengujian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian | Laporan | | | 2 | 2 | | | | | | |
| Penegakan Hukum Pidana Keselamatan Perkeretaapian | Laporan | | | 8 | 7 | | | | | | |
| Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Studi/ Kebijakan/ Kajian/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Prosedur/ Masterplan/ STD Bidang Keselamatan Perkeretaapian | Dokumen | 7 | 7 | 5 | 5 | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|--|------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|----------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait Operasional Satker/ UPT | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Layanan Perkantoran | Tahun | 1 | 1 | 12 | 12 | 24,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Keselamatan Perkeretaapian | Dokumen | | | | | 34,00 | 30,00 | 18,00 | 16,00 | 20,00 | 19,67 |
| Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian | Sertifikat | | | | | 2.786,00 | 2.982,00 | 24,00 | 22,00 | 1.405,00 | 1.314,00 |
| Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian | Sertifikat | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Keselamatan | Dokumen | | | | | 25,00 | 19,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Layanan Internal (Overhead) | Layanan | | | | | 8,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Layanan Dukungan Manajemen Satker | Layanan | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

E. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Tabel 3.6 Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Studi/ Kajian/ Masterplan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian | dokumen | 9 | 9 | 15 | 15 | | | | | | |
| Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian | Kegiatan | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Sosialisasi/ Seminar/ Workshop/ Lokakarya | Tahun | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | |
| Rapat/ Rakor/ Rakornis/ Radin/ Raker | Tahun | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Kegiatan | | | 3 | 3 | | | | | | |
| Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja | Laporan | | | 12 | 11,1 | | | | | | |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian | Laporan | | | 1 | 0 | | | | | | |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian | Laporan | | | 2 | 1 | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Berita Acara Serah Terima Barang | Laporan | | | 3 | 1 | | | | | | |
| Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Laporan Keuangan | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT | Laporan | | | 3 | 3 | | | | | | |
| Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian setingkat Peraturan Menteri Perhubungan | Laporan | | | 9 | 9 | | | | | | |
| Pengawasan di Bidang Perkeretaapian | Laporan | | | 2 | 1 | | | | | | |
| Bantuan Hukum | Laporan | | | 3 | 3 | | | | | | |
| Penyelenggaraan Humas | Laporan | | | 6 | 5 | | | | | | |
| Pameran | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Kegiatan Kerjasama Luar Negeri | Laporan | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian | Laporan | | | 130 | 10 | | | | | | |
| Pembinaan dan Pengembangan Pegawai | Laporan | | | 99 | 70 | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Laporan | | | 13 | 9 | | | | | | |
| Layanan Perkantoran | Laporan | | | 120 | 163,37 | 120 | 117,76 | 10 | 9 | 12 | 11,30 |
| Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Laporan | | | 172 | 87,97 | | | | | | |
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Laporan | | | 491 | 291,65 | | | | | | |
| Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Perkeretaapian | Dokumen | | | | | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Layanan | | | | | 123 | 60,97 | 35 | 34 | 29 | 26,45 |
| Layanan Internal (Overhead) | Layanan | | | | | 18 | 14,8 | 13 | 12 | 13 | 12,67 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2019, berikut disampaikan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019

| PERS- PECTIVE | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SAT | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| STAKE- HOLDERS PERSPEC- TIVE | SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional | IK 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah | Rasio | - | - | - | - | 0,28 | 0,25 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,31 |
| | SP2 Terwujudnya PELAYANAN Transportasi Kereta Api yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah | IK 2 Modal share angkutan penumpang kereta api | % total nasional | - | - | - | - | 4,00 | 5,03 | 5,20 | 5,35 | 5,40 | 5,62 |
| CUS- TOMERS PERSPEC- TIVE | SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN Transportasi Kereta Api | IK 3 Modal share angkutan barang kereta api | % total nasional | - | - | - | - | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,26 |
| | SP4 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN Transportasi Kereta Api | IK 4 Rasio Kejadian Kecelakaan/ Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>) | Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh | 0,55 | 1,15 | 0,55 | 0,24 | 0,55 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,15 |
| | | IK 5 Rasio Gangguan Keamanan pada | Kejadian gangguan | - | - | - | - | 10,7 | 6,59 | 6,50 | 6,89 | 6,50 | 4,44 |

| PERS- PECTIVE | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SAT | TAHUN 2015 | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | |
|------------------|--|---|----------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| | | Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api | keamanan/ 1 juta km tempuh | | | | | | | | | | |
| | SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api | IK 6 Prosentase Capaian <i>On Time Performance (OTP)</i> Transportasi Kereta Api | % | - | - | - | 65,00 | 66,05 | 67,00 | 76,18 | 69,00 | 81,31 | |
| | | IK 7 Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca ari Subsektor Perkeretaapian | % | - | - | - | 6,04 | 15,32 | 18,00 | 18,61 | 20,00 | 29,52 | |
| | | | Juta ton CO2/ tahun | - | - | - | 3,51 | 3,81 | - | - | - | - | - |



B A B 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi.
- c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting.

- b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian.
- c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis.

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah:

- a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian.
- b) Sertifikasi sarana perkeretaapian.
- c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian.
- d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian.
- e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
- f) Pemenuhan kebutuhan IMO.
- g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.
- h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan.
- i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Program pembangunan tahun 2024 difokuskan untuk penyelesaian KDP/kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tersebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan outcome Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
 - a) Infrastructure Maintenance and Operation;
 - b) Penanganan perlintasan sebidang;
 - c) Peningkatan jalur, jembatan fasilitas operasi KA;
 - d) Pengadaan kereta kerja (inspeksi, kereta ukur, crane);
 - e) Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian;
 - f) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (audit, penegakan hukum, sosialisasi).
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas, diantaranya kegiatan:
 - a) Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera;
 - b) Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi;
 - c) Pembangunan Jalur Ganda Sumbagsel dan Lintas Selatan Jawa;

- d) Pembangunan KA perkotaan (Jabodetabek, Palembang, Bandung, Yogyakarta – Solo, Surabaya);
 - e) Reaktivasi jalur KA;
 - f) Pengembangan akses jalur KA ke Pelabuhan dan Bandara.
3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
- a) Subsidi perintis;
 - b) Subsidi angkutan motor gratis pada masa Lebaran;
 - c) Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru;
 - d) Pengelolaan PSO;
 - e) Pemantauan dan evaluasi SPM, tarif dan kinerja angkutan KA.
4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan:
- a) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
 - b) Belanja pegawai;
 - c) Layanan perkantoran;
 - d) Administrasi kegiatan.

4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api baik Prioritas Nasional (PN) dan non PN;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api;
4. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian;
5. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
6. Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional), terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian, Dokumen Perencanaan Teknis.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

**Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024**

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN-STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-)* |
|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 237.061.798 |
| ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | | | 46.232.758 | | 15.142.855 |
| ABF.001 | Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Rekome-dasi | 10 | 39.025.611 | 3 | 13.876.852 |
| ABF.002 | Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)/ Rencana Induk (Master Plan) | Rekome-dasi | 2 | 7.207.147 | 1 | 1.266.003 |
| AFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria | | | 13.303.649 | | 3.054.265 |
| AFA.001 | Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | NSPK | 8 | 13.303.649 | 5 | 3.054.265 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-)* |
|-------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 237.061.798 |
| BAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | 57.339.306 | | 11.974.667 |
| BAH.002 | Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api | layanan | 1 | 57.339.306 | 1 | 11.974.667 |
| CBA | Prasarana Bidang Perkeretaapian | | | 18.318.819 | | 2.019.308 |
| CBA.001 | Jalur Kereta Api | Paket | 1 | 7.330.083 | - | - |
| CBA.002 | Jembatan Kereta Api | Paket | 1 | 605.000 | - | - |
| CBA.003 | Terowongan Kereta Api | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.004 | Stasiun Kereta Api | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.005 | Persinyalan Perkeretaapian | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.006 | Telekomunikasi Perkeretaapian | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.007 | Listrik Aliran Atas | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.008 | Infrastruktur Perkeretaapian | Paket/ Km | 1 | 4.333.736 | 2 | 2.019.308 |
| PBF | | | | | | 6.795.648 |
| PBF.006 | Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Jalur KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggang Balikpapan Menuj Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) | Rekomend asi/ Kebijakan | - | - | 1 | 2.756.000 |
| PBF.007 | Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Jalur KA Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) | Rekomend asi/ Kebijakan | - | - | 1 | 4.039.648 |
| QAH | Pelayanan Publik Lainnya | Layanan | 6 | 291.763.722 | 8 | 200.094.363 |
| QAH.001 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang | Layanan | - | - | 1 | 17.923.742 |
| QAH.002 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Tebing Tinggi-Lalang | Layanan | - | - | 1 | 8.712.521 |
| QAH.003 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai- Besitang-Sei Liput | Layanan | - | - | 1 | 17.000.000 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-)* |
|-------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 237.061.798 |
| QAH.004 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung-Kayu Tanam | Layanan | - | - | 1 | 14.400.000 |
| QAH.007 | Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan | Layanan | - | - | 1 | 84.037.847 |
| QAH.008 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar-Parepare | Layanan | - | - | 1 | 33.733.346 |
| QAH.009 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari-Wonogiri | Layanan | - | - | 1 | 9.197.540 |
| QAH.010 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat-Pondok S5 | Layanan | - | - | 1 | 15.089.367 |
| RBA | Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional) | Km/paket/ unit | | 7.171.092.301 | 256 | 3.945.892.520 |
| RBA.003 | Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran-Rantauprapat Tahap I Segmen Kisaran-Mambang Muda | Km | - | - | 1 | 221.275.901 |
| RBA.004 | Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Bukit Putus-Pauh Lima | Km | - | - | 5 | 84.137.054 |
| RBA.005 | Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracandong-Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracandong-Gedebage dan Segmen Haurpugur-Cicalengka | Km | - | - | 9 | 199.710.983 |
| RBA.008 | Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo-Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan-Kalioso | Km | - | - | 3 | 200.985.892 |
| RBA.011 | Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi lintas Bogor-Yogyakarta | Km | - | - | 1 | 72.799.888 |
| RBA.012 | Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto-Sepanjang | Km | - | - | 33 | 200.000.000 |
| RBA.037 | Peningkatan Stasiun Rangkasbitung | Unit | - | - | 1 | 195.000.000 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-)* |
|-------------|---|--------|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 237.061.798 |
| RBA.038 | Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya-Banyuwangi lintas Segmen Jember-Kalisat | Km | - | - | 17 | 249.272.100 |
| RBA.041 | Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA antara Padalarang-Bandung Tahap II lintas Bogor-Yogyakarta | Paket | - | - | 1 | 81.225.000 |
| RBA.042 | Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon-Kroya segmen Prupuk-Purwokerto | Km | - | - | 57 | 251.248.217 |
| RBA.043 | Peningkatan Jalur KA antara Maos-Cilacap | Km | - | - | 21 | 90.467.956 |
| RBA.044 | Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon-Semarang segmen Tegal-Pekalongan | Km | - | - | 60 | 374.730.110 |
| RBA.045 | Peningkatan Jalur KA lintas Solo-Wonogiri | Km | - | - | 32 | 93.000.000 |
| RBA.046 | Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek | Paket | - | - | 1 | 378.122.842 |
| RBA.048 | Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek-Cirebon Segmen Kertasemaya-Arjawinangun | Km | - | - | 1 | 30.000.000 |
| RBA.049 | Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota-Tanjung Priok | Km | - | - | 1 | 59.462.720 |
| RBA.050 | Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare antara Mandai-Palanro | Paket | - | - | 1 | 100.000.000 |
| RBA.075 | Peningkatan Jalur KA Segmen Labuan Belawan Lintas Medan-Belawan Tahap II | Km | - | - | 1 | 144.830.569 |
| RBA.076 | Peningkatan Jembatan BH 343 Segmen Kisaran-Tanjung Balai | Unit | - | - | 1 | 42.000.000 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-)* |
|-------------|--|--------|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 237.061.798 |
| RBA.077 | Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan-Martapura Tahap I | Unit | - | - | 1 | 120.000.000 |
| RBA.078 | Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I | Unit | - | - | 1 | 230.931.048 |
| RBA.079 | Peningkatan Underpass BH 421 Jatibarang | Unit | - | - | 1 | 58.491.069 |
| RBA.082 | Pembangunan Gardu Traksi Delunggu | Unit | - | - | 1 | 60.000.000 |
| RBA.083 | Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun lintas Makassar-Parepare | Paket | - | - | 1 | 109.000.000 |
| RBA.084 | Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Kras-Ngadiluwih dan Segmen Temuguru-Singojuruh | Unit | - | - | 1 | 57.796.809 |
| RBA.085 | Peningkatan Sistem Telekomunikasi Segmen Kertosono-Talun Lintas Kertosono-Ketapang Tahap I | Km | - | - | 1 | 88.900.000 |
| RBA.086 | Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran-Rantau Prapat Tahap II (Mambang Muda-Padang Halaban) | Km | - | - | 1 | 152.504.362 |
| RBA.035 | Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I | Paket | - | - | 1 | 3.400.000 |
| RBA.025 | Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan – Kadipiro (RM) | Km | - | - | 2 | 60.539.989 |
| RBA.036 | Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (RM) | Km | - | - | 1 | 5.325.433 |
| RBA.078 | Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I (RM) | Unit | - | - | 1 | 12.059.837 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

*Berdasarkan DIPA Awal Ditjen Perkeretaapian TA 2024

4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
2. Sertifikasi Produk, terdiri dari Sertifikasi Sarana Perkeretaapian dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
3. Sertifikasi Profesi dan SDM, terdiri dari Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian;
4. Akreditasi Lembaga, terdiri dari Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
5. OM Prasarana Bidang Perkeretaapian terdiri dari Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO), Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Operasi Prasarana Perkeretaapian;
6. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian, terdiri dari Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

**Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024**

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|---|--------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 2.728.167.573 |
| ADC | Sertifikasi Produk | | 7 | 28.802.439 | 9 | 35.314.380 |
| ADC.001 | Sertifikasi Sarana Perkeretaapian (BLU) | Produk | | | 1 | 14.132.218 |
| ADC.001 | Sertifikasi Sarana Perkeretaapian (RM) | Produk | | | 2 | 5.908.970 |
| ADC.002 | Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (BLU) | Produk | | | 3 | 12.216.444 |
| ADC.002 | Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (RM) | Produk | | | 3 | 3.056.748 |
| ADI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | 5 | 23.023.848 | 3 | 25.427.875 |
| ADI.001 | Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian (BLU) | Orang | | | 1 | 7.306.442 |
| ADI.001 | Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian (RM) | Orang | | | 2 | 18.121.433 |
| ADE | Akreditasi Lembaga | | 2 | 616.188 | 1 | 440.244 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|---|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 2.728.167.573 |
| ADE.001 | Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian | Lembaga | 2 | 616.188 | 1 | 440.244 |
| AFA | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria | | | 6.692.733 | | 4.672.015 |
| AFA.001 | Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian | NSPK | 5 | 6.692.733 | 3 | 4.672.015 |
| CCK | OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian | | | 4.430.560 | | 41.448.299 |
| CCK.003 | Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian | Paket, Unit | 1 | 1.210.000 | 1 | 28.099.118 |
| CCK.004 | Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian | Paket, Unit | 2 | 3.220.560 | 27 | 13.349.181 |
| CDA | OM Prasarana Bidang Perkeretaapian | | | 1.984.689.752 | | 344.408.464 |
| CDA.001 | Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) | Km, Paket | 1 | 1.500.000.000 | 8 | 37.596.733 |
| CDA.002 | Perawatan Prasarana Perkeretaapian | Km, Paket | 2 | 483.479.752 | 2 | 107.358.460 |
| CDA.003 | Operasi Prasarana Perkeretaapian | Paket | 1 | 1.210.000 | 11 | 199.453.271 |
| RCK | OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian | | | | | 122.460.654 |
| RCK.001 | Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian Tahap II | Unit, Paket | - | - | 1 | 122.460.654 |
| RDA | OM Prasarana Bidang Perkeretaapian | | | | | 2.153.995.642 |
| RDA.001 | Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) | Paket | - | - | 7 | 1.500.000.000 |
| RDA.002 | Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih-Tarahan | Km | - | - | 1 | 80.470.971 |
| RDA.004 | Penanganan Rintang Jalan dan Peningkatan 5 Unit Jembatan KA lintas Lubuk Alung-Kayu Tanam | Paket | - | - | 1 | 199.500.000 |
| RDA.005 | Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan | Paket | - | - | 1 | 283.555.842 |

| KODE | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN-STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|--|--------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | | | | | 2.728.167.573 |
| | Peningkatan 2 Unit Jembatan KA lintas Tarahan-Tanjung Enim | | | | | |
| RDA.006 | Penanganan Rintang Jalan Segmen Kawunganten-Jeruklegi lintas Banjar-Kroya dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Prupuk-Linggapura Lintas Prupuk-Purwokerto | Paket | - | - | 1 | 90.468.829 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian, Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Rencana Induk (Master Plan), Studi Lingkungan, Survai, Investigasi dan Rancangan Dasar, Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) dan Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian;
3. Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional) dan Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
4. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Operasi Sarana Perkeretaapian, Perawatan Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
5. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas dan Infrastruktur Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Perkeretaapian Transportasi Tahun 2024

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN-STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|----------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | | | | | 2.146.188.679 |
| ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | | | 98.017.164 | | 35.594.923 |
| ABF.001 | Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian | rekomendasi | - | - | - | - |
| ABF.002 | Pra Studi Kelayakan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>) | rekomendasi | 1 | 1.815.000 | - | - |
| ABF.003 | Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) | rekomendasi | 1 | 1.815.000 | 6 | 9.666.891 |
| ABF.004 | Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) | rekomendasi | 1 | 1.815.000 | - | - |
| ABF.005 | Studi Lingkungan | rekomendasi | 14 | 32.673.398 | 4 | 5.294.306 |
| ABF.006 | Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar | rekomendasi | 1 | 1.815.000 | - | - |
| ABF.007 | Rancangan Rinci (<i>Detailed Design/ Engineering Design</i>) | rekomendasi | 26 | 47.290.765 | 1 | 20.633.726 |
| ABF.008 | Studi Evaluasi Hasil/ Manfaat Proyek | rekomendasi | 6 | 10.793.000 | - | - |
| AFA | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria | | | 233.646.500 | | 28.574.432 |
| AFA.001 | Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian | NSPK | 11 | 215.000.000 | 2 | 23.744.304 |
| AFA.002 | Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian | NSPK | 8 | 18.646.500 | 1 | 4.830.128 |
| CAK | Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian | | | 520.226.552 | | 88.713.214 |
| CAK.001 | Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian | Unit | 36 | 375.026.552 | 1 | 88.713.214 |
| CAK.002 | Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian | Unit | 10 | 121.000.000 | - | - |
| CAK.003 | Sarana Kerja Bidang Konektivitas | Unit | 1 | 12.100.000 | - | - |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|----------------|--|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | | | | | 2.146.188.679 |
| | Perkeretaapian (Prioritas Nasional) | | | | | |
| CAK.004 | Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional) | Unit | 1 | 12.100.000 | - | - |
| CCK | OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian | | | 141.510.192 | | 37.591.882 |
| CCK.001 | Operasi Sarana Perkeretaapian | Tahun, Unit | 1 | 8.638.190 | 1 | 4.000.000 |
| CCK.002 | Perawatan Sarana Perkeretaapian | Tahun, Unit | 1 | 127.990.343 | 4 | 500.000 |
| CCK.003 | Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian | Tahun | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CCK.004 | Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian | Tahun, Unit | 1 | 1.251.659 | 1 | 33.091.882 |
| CCK.005 | Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian | Tahun | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CCK.006 | Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian | Tahun | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA | Prasarana Bidang Perkeretaapian | | | 5.718.753.620 | | 12.582.250 |
| CBA.001 | Jalur Kereta Api | Km'sp | 15 | 400.000.000 | - | - |
| CBA.002 | Jembatan Kereta Api | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.003 | Terowongan Kereta Api | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.004 | Stasiun Kereta Api | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.005 | Persinyalan Perkeretaapian | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.006 | Telekomunikasi Perkeretaapian | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.007 | Listrik Aliran Atas | Paket | 1 | 1.210.000 | - | - |
| CBA.008 | Infrastruktur Perkeretaapian | Km, Paket, Unit | 63 | 5.311.493.620 | 4 | 12.382.250 |
| CBA.008 | Infrastruktur Perkeretaapian (PLN) | Km, Paket, Unit | - | - | 1 | 200.000 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | | | | | 2.146.188.679 |
| PBF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | | | | 2 | 200.000 |
| PBF.001 | Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I | Rekomendasi Kebijakan | - | - | 1 | 100.000 |
| PBF.002 | Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II | Rekomendasi Kebijakan | - | - | 1 | 100.000 |
| RBA | Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian | | | | | 1.675.341.978 |
| RBA.012 | Pembangunan Jalur KA antara Medan-Binjai | Km | - | - | 7 | 679.235.739 |
| RBA.018 | Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Pendamping KPBU) | Paket | - | - | 60 | 267.490.000 |
| RBA.019 | Surabaya Regional Railway Line (Phase I) | Paket | - | - | 1 | 100.000 |
| RBA.023 | Pengadaan Rel dan Wesel R.54 | Km | - | - | 1 | 412.805.855 |
| RBA.030 | Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III Stage I) | Km | - | - | 1 | 583.300.384 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian, Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana

- Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang dan Keselamatan Perkeretaapian;
3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Urusan Organisasi dan Layanan Tata Kelola Internal;
 4. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

**Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024**

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|--|---------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4644 | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian | | | | | 54.733.165 |
| EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | | | 26.086.417 | | |
| EAB.001 | Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | layanan | 4 | 1.789.221 | - | - |
| EAB.002 | Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian | layanan | 5 | 3.957.366 | - | - |
| EAB.003 | Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian | layanan | 5 | 2.962.452 | - | - |
| EAB.004 | Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian | layanan | 15 | 17.377.378 | - | - |
| EAL | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | | | 84.537.720 | | |
| EAL.001 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | layanan | 27 | 34.365.858 | - | - |
| EAL.002 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian | layanan | 15 | 14.029.402 | - | - |
| EAL.003 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian | layanan | 25 | 19.864.620 | - | - |
| EAL.004 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian | layanan | 24 | 16.277.840 | - | - |
| EAH | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | 1.664.788 | | |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|------------|---|---------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| EAH.001 | Layanan Urusan Organisasi | layanan | 1 | 453.763 | - | - |
| EAH.002 | Layanan Tata Kelola Internal | layanan | 3 | 1.211.025 | - | - |
| EAE | Layanan Prasarana Internal | | | 52.262.876 | | |
| EAE.001 | Gedung dan Bangunan | tahun | 1 | 52.262.876 | - | - |
| CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | 1 | 420.000 |
| CAN.001 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Unit | - | - | 1 | 420.000 |
| EBA | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | 6 | 22.217.035 |
| EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (BLU) | Layanan | - | - | 5 | 11.074.494 |
| EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (RM) | Layanan | - | - | 1 | 11.142.541 |
| EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | 1 | 1.080.000 |
| EBB.951 | Layanan Sarana Internal | Unit | - | - | 1 | 1.080.000 |
| EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | 3 | 30.166.130 |
| EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (BLU) | Dokumen | - | - | 1 | 26.979.649 |
| EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (RM) | Dokumen | - | - | 2 | 3.186.481 |
| FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | | 850.000 |
| FAB.001 | Sistem Informasi Pemerintahan | Layanan | - | - | 1 | 850.000 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

Selanjutnya, penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Dukungan Manajemen akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

**Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2024**

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|---|---------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4600 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian | | | | | 9.721.391 |
| EAH | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | 27.488.750 | | |
| EAH.001 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | layanan | 10 | 27.488.750 | - | - |
| EAF | Layanan SDM | | | 12.369.730 | | |
| EAF.001 | Layanan SDM | orang | 18 | 12.369.730 | - | - |
| EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | 4.105.301 |
| EBA.001 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | layanan | - | - | 2 | 4.105.301 |
| EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | 5.616.090 |
| EBC.001 | Layanan SDM | orang | - | - | 1.285 | 5.616.090 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.6 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran;
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan;

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4601 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | | | | | 521.424.006 |
| ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | | | 15.396.076 | | |
| ABF.001 | Kebijakan Perencanaan | Rekomendasi | 17 | 15.396.076 | - | - |
| EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | | | 5.992.097 | | |
| EAB.001 | Layanan Perencanaan | Layanan | 11 | 5.992.097 | - | - |
| EAL | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | | | 49.207.662 | | |
| EAL.001 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan | Tahun | 23 | 15.626.663 | - | - |
| EAL.002 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan | Tahun | 39 | 24.266.944 | - | - |
| EAL.003 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum | Tahun | 5 | 3.888.357 | - | - |
| EAL.004 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum | Tahun | 10 | 5.425.699 | - | - |
| EAC | Layanan Umum | | | 122.747.865 | | |
| EAC.001 | Layanan Organisasi dan Rumah Tangga | Layanan | 102 | 122.747.865 | - | - |
| EAA | Layanan Perkantoran | | | 253.862.189 | | |
| EAA.001 | Gaji dan Tunjangan | Layanan | 22 | 153.200.596 | - | - |
| EAA.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Layanan | 84 | 100.661.593 | - | - |
| EAD | Layanan Sarana Internal | | | 113.854.787 | | |
| EAD.001 | Kendaraan Bermotor | Unit | 3 | 6.441.840 | - | - |
| EAD.002 | Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi | Unit | 9 | 6.937.255 | - | - |
| EAD.003 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | Unit | 9 | 100.475.693 | - | - |
| EAE | Layanan Prasarana Internal | | | 26.365.336 | | |
| EAE.001 | Gedung dan Bangunan | Unit | 1 | 26.365.336 | - | - |
| ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | | | | 4 | 9.116.159 |
| ABF.001 | Kebijakan Perencanaan | Rekomendasi Kebijakan | - | - | 4 | 9.116.159 |
| EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | 347.858.495 |
| EBA.957 | Layanan Hukum | Layanan | - | - | 4 | 2.978.391 |
| EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Layanan | - | - | 48 | 87.565.440 |
| EBA.994 | Layanan Perkantoran | Layanan | - | - | 18 | 257.314.664 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|------------|--|---------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | 259 | 28.289.123 |
| EBB.951 | Layanan Sarana Internal | Unit | - | - | 257 | 13.649.568 |
| EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | Unit | - | - | 2 | 14.639.555 |
| EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | 136.160.229 |
| EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Dokumen | - | - | 19 | 33.720.774 |
| EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | - | - | 32 | 79.142.569 |
| EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | Dokumen | - | - | 23 | 19.564.424 |
| EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | Dokumen | - | - | 13 | 3.732.462 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.7 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Layanan Data dan Informasi. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.7 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET REN- STRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|---|---------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 4602 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian | | | | | |
| EAJ | Data dan Informasi Publik | | 3 | 2.824.008 | | |
| EAJ.001 | Layanan Data dan Informasi | Layanan | 3 | 2.824.008 | - | - |
| BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | 21.752.152 |
| BMA.001 | Pengelolaan Data dan Informasi | Layanan | - | - | 2 | 902.564 |
| CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | |
| CAN.001 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Unit | - | - | 211 | 4.934.054 |
| CDS | OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | |
| CDS.001 | OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Titik/ Lokasi | - | - | 1 | 4.355.021 |

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET RENSTRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|------------|--|---------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | |
| EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | Layanan | - | - | 2 | 1.273.109 |
| FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | | |
| FAB.001 | Sistem Informasi | Layanan | - | - | 4 | 10.287.404 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.8 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokoler. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.8 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET RENSTRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|--|---------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4603 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | | | | | |
| EBA | Layanan Kehumasan dan Protokoler | | | 16.440.222 | | 17.876.058 |
| EBA.958 | Layanan humas dan protokoler | layanan | 22 | 16.440.222 | 13 | 17.876.058 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.9 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian tahun 2024 yaitu layanan hukum. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.9 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

| KODE | KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO) | SATUAN | TARGET RENSTRA | INDIKASI PENDANAAN (.000,-) | TARGET DIPA | DIPA AWAL (.000,-) |
|-------------|--|---------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4604 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian | | | | | |
| EBA | Layanan Hukum | | | 2.897.626 | | 2.595.419 |
| EBA.957 | Layanan Hukum | layanan | 3 | 2.897.626 | 1 | 2.595.419 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 (REVIU)

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020-2024 serta reviu terhadap target tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

| NO. | TUJUAN/ SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | BASE LINE REALISASI TAHUN 2023* | TARGET RENSTRA TAHUN 2024** | REVIU TARGET TAHUN 2024*** |
|-----------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi | | | | |
| | Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur | IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah | 0,443 | 0,360 | 0,460 |
| 2. | Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal | | | | |
| | Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan | IKP2 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api | 90,28 | 82,00 | 90,50 |
| | | IKP3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api | 55,68 | 100,00 | 78,80 |
| | | IKP4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api | 58,07 | 100,00 | 77,80 |
| | | IKP5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQII dan II | 92,87 | 94,00 | 94,00 |
| | | IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian | 3,60 | - | 3,70 |
| 3. | Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Handal | | | | |
| | Keselamatan transportasi perkeretaapian | IKP6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (RoA) | 0,10 | 0,22 | 0,09 |

Sumber:

* Baseline Tahun 2023 berdasarkan Capaian Kinerja hasil Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 (Desember 2023);

** Target 2024 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

*** Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

**Tabel 4.11 Reviu Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon II di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SATUAN | BASE LINE REALISASI TAHUN 2023 TW III | TARGET RENSTRA TAHUN 2024* | REVIU TARGET TAHUN 2024** |
|-----|---|---|--------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian (SK1) | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas yang telah ditindaklanjuti (IKK1) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (SK2) | Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian (IKK2) | % | 97,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional (SK3) | IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (IKK3) | % | 55,79 | 65,00 | 65,00 |
| 4. | Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal (SK4) | IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian (IKK4) | % | 70,37 | 100,00 | 77,00 |
| 5. | Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (SK5) | IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian (IKK5) | % | 75,15 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (SK6) | Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (IKK6) | Nilai | 82,70 | 90,00 | 83,00 |
| | | Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK7) | Level | 3 | 4 | 3 |
| | | Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (IKK8) | % | 63,44 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian (IKK9) | % | 77,33 | 97,00 | 89,00 |
| | | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (IKK10) | Nilai | 3,68 | - | 3,70 |

Ket.: * Target 2024 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

** Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

| NO. | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SATUAN | TARGET TAHUN 2024* |
|-----|--|--------|--------------------|
| 1. | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (IKK 1) | % | 100,00 |
| 2. | Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (IKK 2) | % | 100,00 |
| 3. | Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEK (IKK 3) | % | 88,00 |
| 4. | Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api tepat waktu (IKK 4) | % | 88,00 |
| 5. | Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (IKK 5) | % | 74,46 |
| 6. | Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA (IKK 6) | % | 100,00 |
| 7. | IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat LLAKA (IKK 7) | Nilai | 3,70 |
| 8. | Persentase Realisasi PNBK (IKK 8) | % | 100,00 |
| 9. | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat LLAKA (IKK 9) | % | 88,00 |
| 10. | Nilai AKIP Direktorat LLAKA (IKK 9) | Nilai | 83,40 |
| 11. | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (IKK 11) | Level | 3 |

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

| NO. | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SATUAN | TARGET TAHUN 2024* |
|-----|--|--------|--------------------|
| 1. | Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah (IKK 1) | Rasio | 0,460 |
| 2. | Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II (IKK 2) | % | 94,00 |
| 3. | Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal (IKK 3) | % | 64,92 |
| 4. | IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian (IKK 4) | Nilai | 3,80 |
| 5. | Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (IKK 5) | % | 100,00 |
| 6. | Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian (IKK 6) | % | 100,00 |
| 7. | Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (IKK 7) | Nilai | 84,00 |
| 8. | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian (IKK 8) | % | 92,00 |
| 9. | Persentase Realisasi PNBK Bidang Perkeretaapian (IKK 9) | % | 100,00 |
| 10. | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat | Level | 3 |

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Sarana Perkeretaapian

| NO. | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SATUAN | TARGET TAHUN 2024* |
|-----|--|--------|--------------------|
| 1. | Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (IKK 1) | % | 66,67 |
| 2. | IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 2) | Nilai | 3,70 |
| 3. | Persentase Pemenuhan SMN (IKK 3) | % | 100,00 |
| 4. | Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan (IKK 4) | % | 80,95 |
| 5. | Persentase Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor (IKK 5) | % | 90,00 |
| 6. | Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian (IKK 6) | % | 100,00 |
| 7. | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 7) | % | 86,40 |
| 8. | Persentase Realisasi PNBP (IKK 8) | % | 100,00 |
| 9. | Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 9) | Nilai | 80,60 |
| 10. | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 10) | Level | 3 |

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

| NO. | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SATUAN | TARGET TAHUN 2024* |
|-----|---|--------|--------------------|
| 1. | Penerapan SMKP (IKK 1) | % | 100,00 |
| 2. | Pemenuhan Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian (IKK 2) | % | 100,00 |
| 3. | Pemenuhan Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian (IKK 3) | % | 160,00 |
| 4. | Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/ sudah diimplementasikan/ ditindaklanjuti (IKK 4) | % | 72,00 |
| 5. | Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian (IKK 5) | % | 100,00 |
| 6. | Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian (IKK 6) | % | 66,67 |
| 7. | IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 7) | Nilai | 3,85 |
| 8. | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 8) | % | 90,00 |
| 9. | Persentase Realisasi PNBP Bidang Keselamatan Perkeretaapian (IKK 9) | % | 100,00 |
| 10. | Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 10) | Nilai | 83,35 |
| 11. | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 11) | Level | 3 |

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.



B A B 5

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi transportasi perkeretaapian dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan ***New Initiatives*** maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam **Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024** sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang nyata di bidang perkeretaapian serta dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.